

**KEKUATAN PARTAI POLITIK PADA MASA ORDE BARU**

**(SKRIPSI)**

**Oleh :**

*Putri Rahayu*



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN PARTAI POLITIK PADA MASA ORDE BARU**

**Oleh**

**PUTRI RAHAYU**

Sejak Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 partai politik dianggap sebagai penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada tahun 1950an-1960an dalam periode perkembangan partai politik pada masa Orde Baru adalah adanya penyederhanaan jumlah partai politik. Pembaharuan ini akhirnya mengerucut menjadi ide tentang fusi partai dan membagi partai-partai yang ada menjadi tiga kelompok. Kenyataannya, pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu memenangkan Pemilu selama Orde Baru, dikarenakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat menguntungkan Golongan Karya (Golkar).

Tujuan penulis dalam penelitian adalah untuk Mengetahui Penyebab terjadinya ketimpangan kekuatan diantara partai-partai politik pada masa orde baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah Metode Historis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya ketimpangan kekuatan partai politik pada masa orde baru dikarenakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat menguntungkan Golkar. melalui Kebijakan, yaitu dikeluarkan nya kebijakan fusi partai politik menjadi tiga yaitu PPP, PDI, dan Golongan Karya. kebijakan pemerintah melakukan fusi partai bukan tanpa alasan kebijakan fusi partai yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan posisi Golongan Karya menjadi semakin kuat dibanding pesaing lainnya. Pemenangan Golongan Karya melalui dukungan rezim, strategi partai, dukungan organisasi masa.

*Kata Kunci: Kekuatan, Partai Politik, Orde Baru.*

## **ABSTRACT**

### **POWER OF POLITICAL PARTIES IN THE NEW ORDER TIME**

**By**

**PUTRI RAHAYU**

Since Suharto became president in 1967 political parties were considered to be the cause of the political instability that occurred in the 1950s-1960s during the development period of political parties during the New Order era, namely the simplification of the number of political parties. This renewal eventually boiled down to the idea of party fusion and dividing the existing parties into three groups. In fact, the election was directed at the victory of certain participants, namely the Golkar Karya (Golkar) who always won elections during the New Order, because various policies issued by the government were very profitable for Golkar.

The aim of the authors in this research is to find out the causes of the power imbalance between political parties during the New Order era. The method used in this research is the Historical Method with data collection techniques used are library techniques, interviews, documentation.

The results of the study show that the cause of the imbalance in the power of political parties during the New Order era was due to various policies issued by the government that greatly benefited Golkar. through Policy, namely the issuance of a policy of fusion of political parties into three namely PPP, PDI, and Golongan Karya. The government's policy of party fusion is not without reason, the party fusion policy carried out by the government has made Golongan Karya's position even stronger compared to other competitors. Golongan Karya won through regime support, party strategy, mass organizational support.

*Keywords: Strength, Political Parties, New Order.*

# **KEKUATAN PARTAI POLITIK PADA MASA ORDE BARU**

Oleh

*Putri Rahayu*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**Judul Skripsi** : **KEKUATAN PARTAI POLITIK PADA MASA ORDE BARU**

**Nama Mahasiswa** : **Putri Rahayu**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **1713033001**

**Program Studi** : **Pendidikan Sejarah**

**Fakultas** : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. Syaiful M, M. Si.**  
NIP. 19610703 198503 1 004

**Cheri Saputra S.Pd., M.Pd.**  
NIK. 231304850630101

**MENGETAHUI**

**Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial**

**Drs. Tedi Rusman, M.Si.**  
NIP. 19600826 198603 1 001

**Ketua Program Studi  
Pendidikan Sejarah**

**Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19811225 200812 1 001

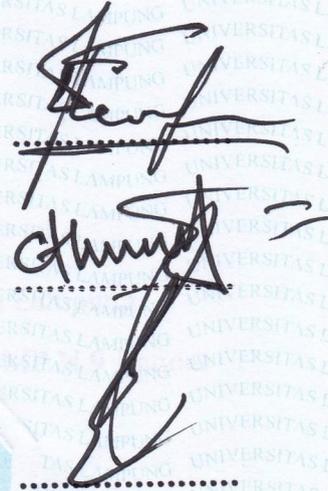
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Syaiful M, M.Si.

Sekretaris : Cheri Saputra, S.Pd., M.Pd.

Penguji  
Bukan Pembimbing : Drs. Maskun, M.H.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.  
NIP. 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Oktober 2022

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Putri Rahayu  
NPM : 1713033001  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/ FKIP Universitas Lampung  
Alamat : Jalan Amir Hamzah, Komplek SMP N 9 Bandar Lampung No:42.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 07 Oktober 2022



Putri Rahayu

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 29 juli 1999. Penulis Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Bapak Rahman dan Ibu Aminah Wati. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Bhayangkari Bandar Lampung pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2005. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Palapa diselesaikan pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2014, lalu dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis di terima di Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, di Program Studi Pendidikan Sejarah melalui jalur SNMPTN.

Pada Semester VI penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, dan menjalani Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Jurusan, dan tingkat Program Studi. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang diikuti Himpunan Mahasiswa IPS, Forum Komunikasi Mahasiswa Pendidikan Sejarah (FOKMA).

# MOTTO

*La Tahzan Innallaha Ma'ana*

*(Jangan Bersedih Sesungguhnya Allah Bersama Kita).*

*—Qs. At-Taubah:40—*

*Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Yang Pintar Melainkan Milik*

*Mereka Yang Senantiasa Berusaha.*

*—B.J Habibie—*

# PERSEMBAHAN



*Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat karunia, rahmat dan hidayah yang diberikan.*

*Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan Akhlaqul Kharimah.*

*Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:*

*Seluruh Keluarga besarku yang selalu mendukungku Terutama dua orang paling berharga dalam hidupku, Ayah dan Bunda yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Teruntuk Ayah dan Bunda terimakasih atas doa terbaik di dalam setiap sujudmu dan harapan di setiap hembusan nafasmu, terimakasih sudah menjadi orang tua terhebat dalam segala hal.*

*Kakaku Tersayang Rudi Wijaya, A.Md. terimakasih sudah selalu menjadi orang paling terdepan dalam segala hal setelah Ayah dan Bunda.*

*Adikku Tersayang Muhammad Rizki yang sekarang sudah beranjak dewasa semangat selalu dalam berkuliah semoga Allah selalu permudah jalan mu.*

*Seseorang yang istimewa Roynaldi Z.N, S.H. terimakasih atas waktu yang diberikan dalam setiap langkah perjuangan panjang selama ini.*

*Rekan-rekan seperjuangan penulis di Program Studi Pendidikan Sejarah 2017 yang telah menjadi tokoh sejarah yang luar biasa dalam perjalanan penulis.*

*Almamater tercinta "Universitas Lampung"*

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kekuatan Partai Politik Pada Masa Orde Baru**” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. Wakil Dekan Bidang Kesiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

6. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah terima kasih atas segala saran serta masukan, dan motivasi selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Syaiful M, M.Si. selaku Dosen Pendidikan Sejarah serta Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen PA, terima kasih atas segala saran serta masukan, dan motivasi selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Bapak Cheri Saputra, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pendidikan Sejarah serta Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih atas segala masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Drs. Maskun, M.H. selaku Dosen Pendidikan Sejarah serta Dosen Pembahas skripsi penulis, terima kasih atas segala masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Drs. Ali Imron, M.Hum., Bapak Drs. Syaiful. M. M.Si., Bapak Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd., Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd., Bapak Cheri Saputra, S.Pd., M.Pd., Ibu Myristica Imanita, S.Pd., M.Pd., Bapak Marzius Insani, S.Pd., M.Pd., Bapak Sumargono, S.Pd., M.Pd., Ibu Valensy Rachmedita, S.Pd., M.Pd., Ibu Nur Indah Lestari S.Pd, M.Pd., Bapak Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd., dan Ibu Aprilia Tri Aristina, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang penulis sayangi dan pendidik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.

11. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha dan Karyawan Universitas Lampung.
12. Perpustakaan Nasional terima kasih atas ilmu, bantuan dalam bentuk apapun.
13. Sahabat Penulis sedari kecil: Rizky Septarina, Sally Prabawati, Maretha Ghassani.
14. Sahabat penulis selama masa pendidikan: Resta Octavia, Fadillah Asatiza, Mei Susanti, Agustri Ningsih, Listy Fasa Hardiyanti, Sandra Aprilia, Hesti Sukma Wati, Annisa Kurniasih, Sindi Nurul Syafitri, Sarah Pusparini, Jiliani Poli'i, Astika Oktaviana, Ratu Marshelia Hakim, Ririn Novita Sari, Nuni Alawiyah, Theresia Tri Ranti, Nadia Maharani, Deka Rio Alditanasya, M.Rizky Rabbani, Nono Nainggolan, Erlyana Tunjung Sari, Rahmania Erilya, T.R Alfi Yunita.
15. Teman seperjuangan yang telah membantu dalam perkuliahan ini dalam suka maupun duka yaitu teman-teman Pendidikan Sejarah 2017.
16. Keluarga besar Pendidikan Sejarah, terima kasih atas kekeluargaan ini hingga menjadi memori indah yang akan selalu dikenang oleh penulis.
17. Keluarga Besar SMA Muhammadiyah 1 Bandar Lampung & MA Al-Falah Muncak.

Semoga hasil penulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian semua berikan.

Bandar Lampung, 07 Oktober 2022

Putri Rahayu

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6 Kerangka Berfikir .....	9
1.7 Paradigma .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	13
2.1.1 Kekuatan Politik .....	13
2.1.2 Partai Politik.....	14
2.1.3 Orde Baru .....	16
2.1.4 Ketimpangan Kekuatan Partai Politik Masa Orde Baru .....	18
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian .....	20
3.1.1 Metode Historis .....	20
3.1.2 Heuristik.....	22
3.1.3 Kritik.....	23
3.1.4 Interpretasi .....	24
3.1.5 Historiografi .....	24
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.2.1 Teknik Kepustakaan.....	25
3.2.2 Teknik Dokumentasi .....	26
3.2.3 Teknik Wawancara.....	26
3.3 Teknik Analisis Data .....	26

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil.....	28
4.1.1 Gambaran Umum Pemilihan Umum Orde Baru .....	28
4.1.2 Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Masa Orde Baru .....	29
4.2 Pembahasan .....	50
4.2.1 Kebijakan pemerintah Yang Menyebabkan Ketimpangan Politik .....	50

**V. SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan .....	56
5.2 Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1.7 Paradigma .....	13
4.1 Strategi Golongan Karya Melalui Birokrasi .....	44
4.2 Kampanye Golkar .....	45
4.3 Hasil Resmi Pemilu 1977 .....	48
4.4 Hasil Resmi Pemilu 1992.....	49

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
4.1 Data Mengenai Pelaksanaan Pemilu Pada Tahun 1971 .....	29
4.2 Data Mengenai Pelaksanaan Pemilu Pada Tahun 1977 .....	30
4.3 Data Mengenai Pelaksanaan Pemilu Pada Tahun 1982 .....	31
4.4 Data Mengenai Pelaksanaan Pemilu Pada Tahun 1987 .....	32
4.5 Data Mengenai Pelaksanaan Pemilu Pada Tahun 1992 .....	33
4.6 Data Mengenai Pelaksanaan Pemilu Pada Tahun 1997 .....	34

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejak era kemerdekaan, melalui Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No X/1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multi partai di Indonesia. Keputusan Wapres ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada pemilu tersebut di ikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen (perseorangan) (Radi, 1984: 76).

Sejak Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 partai politik dianggap sebagai penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada tahun 1950an-1960an. Oleh karena itu agenda yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik. Meskipun dari sisi jumlah partai politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem multi partai (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

Munculnya Orde Baru sekaligus membawa warna baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Salah satu ciri yang menonjol di dalam periode perkembangan partai politik pada masa Orde Baru adalah adanya penyederhanaan jumlah partai politik. Pembaharuan ini akhirnya mengerucut menjadi ide tentang fusi partai dan membagi partai-partai yang ada menjadi tiga kelompok (Radi, 1984: 76).

Memasuki tahun 1973 usaha membina stabilitasi politik berhasil dicapai karena partai-partai politik telah melakukan fusi. Dengan adanya pembinaan terhadap parpol-parpol dalam masa Orde Baru maka terjadilah penyederhanaan parpol sebagai wadah aspirasi warga masyarakat. Pada tahun 1973 pengelompokan partai tersebut menjadi:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terdiri dari: Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), terdiri dari: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
3. Golongan Karya (Golkar).

Penyederhanaan jumlah partai pada awal masa Orde Baru menunjukkan peranan Presiden Soeharto yang semakin dominan, hal ini sangat membatasi ruang gerak masyarakat terutama untuk menyalurkan aspirasi ataupun memberikan kritik kepada pemerintah (Maf'ul, 2012: 79).

Golongan Karya (Golkar) adalah organisasi politik yang tumbuh dan berkembang pada masa Orde Baru. Golkar menjadi satu-satunya partai yang memiliki kekuatan yang besar pada masa itu, dengan didukung oleh kekuatan dari berbagai pihak menjadikan Golkar sebagai organisasi politik yang terkenal dan tumbuh pada masa Orde Baru.

Golkar dapat selalu meraih kemenangan dalam pemilihan Umum pada Masa Orde Baru, salah satu kekuatan politik yang menjadi penyokong kemenangan Golkar adalah militer.

Penyelenggaraan Pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Kenyataannya, pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu memenangkan Pemilu selama Orde Baru. Pemilu hanya simbol untuk dikatakan demokratis saja, pada nilai- nilai pemilu jauh dari jujur, terbuka dan demokratis. Hasil pemilu pada masa Orde baru, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap (Noviah Iffatun Nisa, Dkk, 2017: 1).

Golongan Karya (Golkar) memiliki akar sejarah yang panjang dalam perpolitikan Indonesia. Semangat awal pembentukan Golkar dilatarbelakangi upaya untuk membendung pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mempertahankan ideologi negara Pancasila. Dengan semangat dan tujuan yang sama, membendung pengaruh PKI. Golkar menjadi sebuah kekuatan politik alternatif yang mengusung ideologi modernisasi, Dalam perkembangannya Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan dan memperlancar agenda politik dan pembangunan Orde Baru (Akbar Tandjung, 2007: 40).

Sejak awal Indonesia berdiri, kehidupan politik dan hukum diwarnai begitu rupa, keadaan kehidupan politik di indonesia tidak dalam pengertian demokrasi yang sesungguhnya, tetapi justru dapat dikatakan pusat kekuasaan berada pada satu

tangan, Pada masa kepemimpinan presiden Soeharto Golkar merupakan organisasi politik yang berjaya pada masa Orde Baru.

Strategi Pemenangan Golongan Karya dalam pemilihan Umum pada Masa Orde Baru menggunakan berbagai cara, yaitu:

1. Strategi Pemenangan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum pada Masa Orde Baru melalui Rezim

ABRI dengan Dwi Fungsinya yaitu sebagai kekuatan Pertahanan dan Keamanan maupun sebagai kekuatan sosial dan politik bergerak bersamaan dalam dua lingkungan politik yaitu dalam pemerintahan dan masyarakat.

2. Strategi Pemenangan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum pada Masa Orde Baru melalui Strategi Partai

Pada setiap pemilihan umum, Golkar sangat menonjol dalam kampanye dibanding partai-partai lainnya. Golkar memiliki cara tersendiri dalam melakukan kampanye seperti: Golkar undang pers asing beserta para artis papan atas dan mendominasi keberadaannya melalui panggung-panggung musik sehingga menarik massa dalam berkampanye, Golkar menarik massa melalui Pelopor Pembangunan.

3. Strategi Pemenangan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum pada Masa Orde Baru melalui Organisasi Massa.

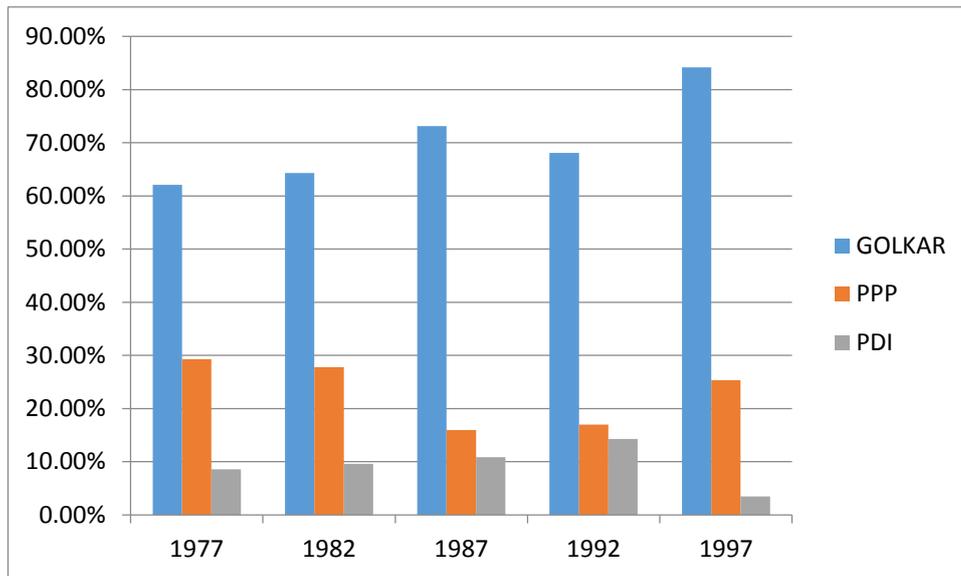
GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) yang merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam memiliki andil pula dalam kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 GUPPI memainkan peranan yang penting dan strategis dalam upaya menarik massa Islam sebanyak-banyaknya (Noviah Iffatun Nisa, Dkk, 2017: 145).

Selama masa Orde Baru Golkar selalu menjadi partai politik yang tidak terkalahkan. Hal ini tentunya juga dilihat karena Golkar semenjak masa pemerintahan Orde Baru adalah merupakan partai pemerintah, ditambah lagi militer merupakan kekuatan politik yang dominan di dalam Golkar dan juga adanya tambahan kekuatan dari birokrat pada saat itu.

Pada masa itu Golkar juga selalu mendapat perlakuan istimewa pada pemerintahan dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya. Di masa Orde Baru, ada tiga pilar kekuatan Golkar, yaitu ABRI, Birokrasi dan Golongan Karya. Anggota ABRI, walau tidak ikut memilih dalam pemilu adalah kekuatan utama Golkar (Leo Suryadinata, 1992: 145).

Militer, birokrasi, organisasi massa, dan kebijakan pemerintah menjadi komponen dalam kemenangan Golkar pada Pemilihan Umum di Era Orde Baru, itu sebabnya pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto bisa bertahan lebih dari tiga dekade, karena didukung oleh hampir seluruh komponen politik di seluruh tanah air. Pemilihan Umum pada Masa Orde Baru dalam setiap dekade dari tahun 1971-1997 selalu dimenangkan oleh Golkar (Noviah Iffatun Nisa, Dkk, 2017: 146).

### Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Masa Orde Baru



Dari gambar hasil perolehan suara pada pemilihan partai politik pada masa orde baru terlihat sangat jelas ketimpangannya terlihat dari perolehan suara Golkar yang selalu unggul dalam setiap pemilihan. Maka, dari penjabaran diatas peneliti ingin melihat Kekuatan Partai Politik Pada Masa Orde Baru. dikarenakan adanya ketimpangan kekuatan diantara partai-partai politik pada masa Orde Baru. Pemaparan tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kekuatan Partai Politik Pada Masa Orde Baru”**.

#### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Adanya Penyederhanaan Partai Politik Pada Masa Orde Baru (PPP, PDI dan GOLKAR).
2. Terdapat Ketimpangan Perolehan Suara Partai Politik Pada Masa Orde Baru.

3. Dalam Struktur Kekuasaan Pemerintahan Ketimpangan Terlihat Dari Dominasi Orang-Orang Golkar.
4. Adanya Kebijakan Pemerintah Yang Menguntungkan Golkar.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan Perolehan Suara Partai Politik Pada Masa Orde Baru

### **1.4 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kekuatan diantara partai-partai politik yang berpengaruh terhadap perolehan suara pada masa orde baru?

### **1.5 Tujuan, Manfaat, dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini, adalah untuk

1. Mengetahui Penyebab terjadinya ketimpangan kekuatan diantara partai-partai politik pada masa orde baru.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

#### 1. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan, selain itu dapat memberikan akses informasi lebih lanjut terkait dengan Kekuatan Partai Politik Pada Masa Orde Baru.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumber kajian ilmiah baru dan menjadi referensi mengenai Kekuatan Partai Politik Pada Masa Orde Baru.

#### 2. Manfaat Akademis

- a. Skripsi ini akan menjadi bahan literature dan referensi tentang studi ilmu sejarah mengenai besarnya pengaruh Kekuatan Partai Politik Pada Masa Orde Baru.
- b. Melatih penulis membuat karya analisis penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

### **1.5.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Dari masalah yang sudah dipaparkan diatas maka dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman, dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan tentang:

#### a. Objek Penelitian:

Objek dalam penelitian ini adalah Kekuatan Partai Politik Pada Masa Orde Baru.

#### b. Subjek Penelitian:

Subjek penelitian ini adalah Partai Politik Pada Masa Orde Baru.

c. Tempat Penelitian:

Tempat penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Nasional Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

d. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2021 - 2022.

e. Konsentrasi Ilmu

Konsentrasi ilmu pada penelitian ini adalah Ilmu Sejarah.

## **1.6 Kerangka Berfikir**

Munculnya Orde Baru sekaligus membawa warna baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Salah satu ciri yang menonjol di dalam periode perkembangan partai politik pada masa Orde Baru adalah adanya penyederhanaan jumlah partai politik. Meskipun dari sisi jumlah partai politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem multi partai. Pembaharuan ini akhirnya mengerucut menjadi ide tentang fusi partai dan membagi partai-partai yang ada menjadi 2 Partai Politik dan 1 Golongan:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terdiri dari: Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), terdiri dari: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
3. Golongan Karya (Golkar).

Penyederhanaan jumlah partai pada awal masa Orde Baru menunjukkan peranan Presiden Soeharto yang semakin dominan. Pada Pelaksanaan Pemilu tahun 1971-1997 dikarenakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sangat menguntungkan Golkar, seperti adanya aturan bahwa semua Pegawai Negeri harus mendukung Golkar, serta banyaknya pengangkatan terhadap para perangkat desa menjadi pegawai negeri, tujuan pengangkatan para perangkat desa tersebut dimaksudkan agar kepala desa mampu mengarahkan warganya untuk memilih Golkar dalam Pemilihan Umum.

Golkar selalu unggul dalam jumlah suara. Selama masa Orde Baru Golkar selalu menjadi partai politik yang tidak terkalahkan. Hal ini tentunya juga dilihat karena Golkar semenjak masa pemerintahan Orde Baru adalah merupakan partai pemerintah, ditambah lagi militer merupakan kekuatan politik yang dominan di dalam Golkar dan juga adanya tambahan kekuatan dari birokrat pada saat itu.

Pada masa itu Golkar juga selalu mendapat perlakuan istimewa pada pemerintahan dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya. Di masa Orde Baru, ada tiga pilar kekuatan Golkar, yaitu ABRI, Birokrasi dan Golongan Karya. Anggota ABRI, walau tidak ikut memilih dalam pemilu adalah kekuatan utama Golkar.

Pada Masa Orde Baru terdapat berbagai kebijakan yang menguntungkan Golongan Karya Yaitu:

#### 1. Strategi Pemenangan Golkar Melalui Dukungan Rezim

ABRI dengan Dwi Fungsinya dilandaskan oleh UU No 20 Tahun 1982 Tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara. Bertujuan menjadikan

ABRI sebagai kekuatan Pertahanan dan Keamanan maupun sebagai kekuatan sosial dan politik bergerak bersamaan dalam dua lingkungan politik yaitu dalam pemerintahan dan masyarakat.

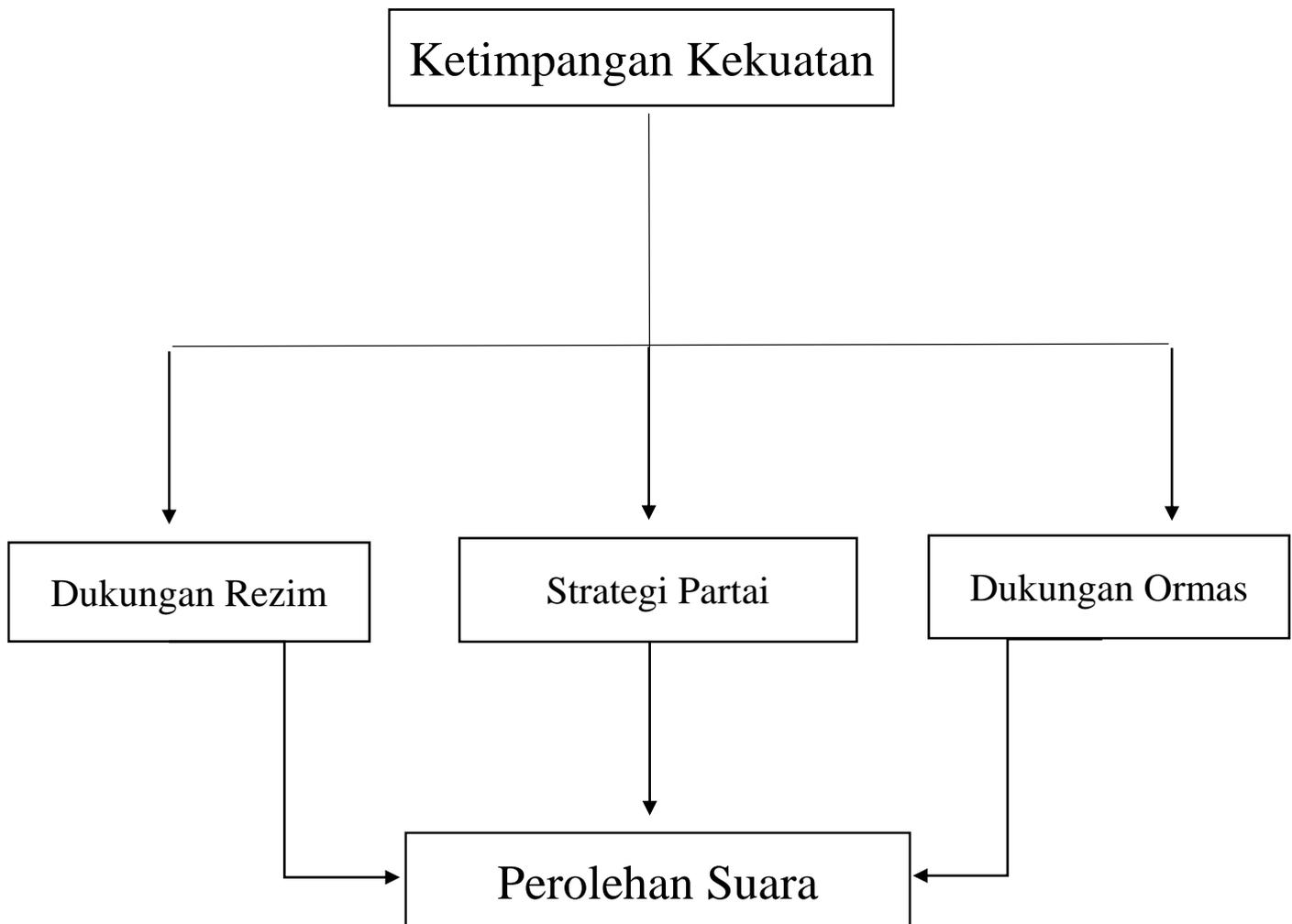
## 2. Strategi Pemenangan Golkar Melalui Strategi Partai

Pada setiap pemilihan umum, Golkar sangat menonjol dalam kampanye dibanding partai-partai lainnya. Golkar memiliki cara tersendiri dalam melakukan kampanye seperti: Golkar undang pers asing beserta para artis papan atas dan mendominasi keberadaannya melalui panggung-panggung musik sehingga menarik massa dalam berkampanye, Golkar menarik massa melalui Pelopor Pembangunan.

## 3. Strategi Pemenangan Golkar Melalui Organisasi Massa.

GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam) yang merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam memiliki andil pula dalam kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 GUPPI memainkan peranan yang penting dan strategis dalam upaya menarik massa Islam sebanyak-banyaknya.

### 1.7 Paradigma



**Keterangan :**

—————> : Garis Hubung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berisi konsep-konsep yang dijadikan landasan teoritis bagi peneliti yang dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah:

#### **2.1.1 Kekuatan Politik**

kekuatan politik adalah masuk dalam pengertian individual maupun kelembagaan, dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik, orang-orang tersebut terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan di sini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.

kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk ke dalam partai-partai politik. Sementara yang di artikan dengan kekuatan-kekuatan politik yang bersifat nonformal yaitu bagian dari Dalam kekuatan politik di era reformasi terdiri dari beberapa sumber, diantaranya :

- a. Sarana paksaan fisik seperti senjata dan teknologi
- b. Kekayaan seperti uang dan tanah

- c. Normatif seperti pemimpin agama dan kepala suku
- d. Popularitas pribadi
- e. Jabatan keahlian
- f. Massa yang terorganisir
- g. Informasi

### **2.1.2 Partai Politik**

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik. Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata polities yang berarti warga negara, politik episteme yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi (Gani.S.I, 1984: 14).

Menurut Carl J. Friedrich yang dikutip Miriam Budiardjo, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideil maupun materiil. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Sigmund Neuman menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis

politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (Budiardjo, 1989: 160).

Batasan partai politik menurut RH Soltau dalam *An Introduction to Politics* ternyata sama dengan batasan yang diberikan oleh Raymond Garfield Gettel dalam *Political Science*. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi orang ataupun golongan berusaha untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaan (Gani S.I, 1984: 112). Sistem kepartaian yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru didasarkan pada konsep stabilitas politik sebagai dasar pembangunan Indonesia. Dalam jurnal *Legitimacy Questions and the Suharto Polity* (1980) karya Herbert Feith, konsep stabilitas politik merupakan konsep politik yang membentuk kondisi keamanan dalam negeri harus tetap terjaga. Dalam konsep ini, pemerintah meniadakan oposisi dari kelompok-kelompok sipil dan kekuatan politik lain.

Berdasarkan konsep stabilisasi politik, berikut sistem kepartaian masa Orde Baru: Depolitisasi Partai Depolitisasi adalah upaya untuk menghilangkan atau menghapuskan kegiatan politik. Atas dasar TAP MPRS No IX tahun 1996 tentang Stabilitas Politik dan Keamanan, pemerintah Orde Baru berusaha untuk menghilangkan partai politik dengan ideologi 'kiri' seperti komunis dan sosialis di Indonesia. Penyederhanaan Partai Pemerintah Orde Baru melaksanakan program penyederhanaan partai melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari penyaluran aspirasi masyarakat serta kemudahan dalam pengendalian partai politik.

Sembilan partai politik digabungkan menjadi dua partai berdasarkan pandangan politiknya. NU, Parmusi, Perti, dan PSII digabungkan menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan). PNI, Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, dan IPKI digabungkan menjadi PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Politik Massa Mengambang Pemerintah Orde Baru berusaha untuk meminimalisir perkembangan dan dinamika partai politik dengan menerapkan konsep politik ‘‘Massa Mengambang’’. Dalam konsep politik ini, partai politik tidak diperbolehkan untuk memiliki cabang atau ranting lebih rendah dari level kecamatan. Disisi lain, dibentuklah Golongan Karya (Golkar) yang merupakan organisasi yang mewadahi massa mengambang, pegawai negeri sipil dan angkatan bersenjata. Golkar sebagai sebuah organisasi diperbolehkan untuk mengikuti Pemilu serta diperbolehkan untuk memiliki jaringan hingga level desa melalui aparat birokrasi dan militer. Hal tersebut menjadikan Golkar memiliki keunggulan dalam sosialisasi dan mobilisasi dibandingkan dengan partai politik yang ada pada masa itu (Gama Prabowo, 2020).

### **2.1.3 Orde Baru**

Masa Orde Baru berjalan dimulai pada tahun 1966 dimana Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, hingga tahun 1998 yaitu saat Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Pada masa Orde Baru terjadi enam kali pemilihan umum. Adanya keikutsertaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam pemilihan umum dengan bergabung dalam Golongan Karya (Golkar).

Pada masa pemerintahan orde baru, salah satu tindakan MPRS saat itu yang berhubungan dengan partai politik adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui TAP MPRS No. XXV/1966 disamping ketetapan pencabutan penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sementara itu, terjadi perdebatan melalui berbagai seminar dan media massa, antara lain mengenai perlunya mendirikan demokrasi dan membentuk suatu sistem politik yang demokratis dengan merombak struktur politik yang ada. Partai politik menjadi sasaran utama dari kecaman masyarakat dianggap telah bertindak memecah belah karena terlalu mementingkan ideologi serta kepentingan masing-masing (Liddle, 1992: 61).

Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan bertulang punggungkan personil militer, dan cenderung anti demokrasi. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Orde Baru berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu di bawah Orde Baru memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu yang dikenal negara-negara demokrasi pada umumnya (Darwis, 2009: 15).

#### **2.1.4 Ketimpangan Kekuatan Partai Politik Masa Orde Baru**

Munculnya Orde Baru sekaligus membawa warna baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Salah satu ciri yang menonjol di dalam periode perkembangan partai politik pada masa Orde Baru adalah adanya penyederhanaan jumlah partai politik. Pembaharuan ini mengerucut menjadi ide tentang fusi partai dan membagi partai-partai yang ada menjadi 2 Partai dan 1 Golongan (Radi, 1984: 76).

- 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terdiri dari: Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).
- 2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI), terdiri dari: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
- 3) Golongan Karya (Golkar).

Penyederhanaan jumlah partai pada awal masa Orde Baru menunjukkan peranan Presiden Soeharto yang semakin dominan, hal ini sangat membatasi ruang gerak masyarakat terutama untuk menyalurkan aspirasi ataupun memberikan kritik kepada pemerintah (Maf'ul, 2012: 79).

Golongan Karya (Golkar) adalah organisasi politik yang tumbuh dan berkembang pada masa Orde Baru. Golkar menjadi satu-satunya partai yang memiliki kekuatan yang besar pada masa itu, dengan didukung oleh kekuatan dari berbagai pihak menjadikan Golkar sebagai organisasi politik yang terkenal dan tumbuh pada masa Orde Baru. Golkar dapat selalu meraih kemenangan dalam pemilihan Umum pada Masa Orde Baru, salah satu kekuatan politik yang menjadi penyokong kemenangan Golkar adalah militer.

Penyelenggaraan Pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Pada kenyataannya, pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu memenangkan Pemilu selama Orde Baru. Pemilu hanya simbol untuk dikatakan demokratis saja, pada nilai-nilai pemilu jauh dari jujur, terbuka dan demokratis. Hasil pemilu pada masa Orde baru, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap (Noviah Iffatun Nisa, Dkk, 2017: 1).

Ketimpangan kekuatan partai politik pada masa orde baru artinya adalah ketidakmerataan nya kekuatan dari masing-masing partai politik hal ini dapat kita lihat dari ketiga kontestan Golongan Karya, PPP, dan PDI yang bersaing kekuatannya tidak merata dan cenderung lebih menguntungkan kesalah satu kontestan dalam hal ini Golongan Karya (Golkar) Mengapa demikian hal tersebut dapat dikatakan dengan ketimpangan kekuatan dapat kita lihat pada periode 1971-1998 partai Golongan Karya selalu memenangkan pemilihan umum secara berturut-turut.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan metode yang menyangkut masalah kerja yakni cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Husin, 1989: 32). Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Dalam metode penelitian sejarah terdapat Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat menyelesaikan penelitian sejarah. Berikut ini adalah Langkah-langkah metode penelitian sejarah yaitu: Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

##### **3.1.1 Metode Historis**

Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Metode sejarah dalam pengertian umum adalah suatu penyelidikan permasalahan dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari pandangan historis (Abdurrahman, 1999: 53).

Metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atas suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas

dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang (Nawawi, 2001: 79).

Penelitian dengan metode sejarah adalah suatu penelitian untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, serta menjelaskan dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat (Nazir, 2009: 48). dokumen, rekaman dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta yang kemudian akan menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. Metode merupakan cara untuk mengerjakan sesuatu dalam sistem yang terencana dan teratur. Metode sejarah mengenalkan cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Dalam setiap penelitian pasti mempunyai metode tersendiri sebagai prosedur untuk menganalisis secara kritis dari objek penelitian (Kuntowijoyo, 1995: 64). Menurut pengertiannya, metode sejarah adalah proses menganalisis dan menguji secara kritis rekamanrekaman dan peninggalan masa lampau.

Untuk melaksanakan penelitian dengan metode historis menurut Kuntowijoyo dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah menerangkan bahwa kesimpulan sejarah harus didasarkan dengan empat tahapan: (Kuntowijoyo, 1995: 36).

1. Heuristik atau pengumpulan data sejarah yang betul-betul valid dan autentik yang kemudian terbagi data primer dan sekunder;
2. Kritik atau pengujian kebenaran dari data yang disajikan. Jika sudah betul betul lulus uji alias kebenarannya tidak disangsikan maka data itu disebut

fakta sejarah;

3. Interpretasi. Fakta-fakta sejarah tadi kemudian di interpretasikan dengan menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial atau ilmu bantu lainnya sehingga dapat diketahui hakikat dibalik kejadian sejarah atau fakta sejarah.
4. Histiografi. Apabila sudah melakukan interpretasi baru masuk tahapan menyimpulkan dengan menuliskannya. Tahap inilah tahap yang disebut histiografi (Kuntowijoyo, 1995: 36).

### **3.1.2 Heuristik**

Menurut (Dudung Abdurahman, 2007: 64). sebelum melakukan pencarian hendaknya seorang peneliti melakukan kajian mengenai bibliografi penelitian terdahulu sehingga terkumpul sebagian data dan dapat mempertimbangkan apakah tepat untuk dijadikan sumber sejarah atau data sejarah. Pada tahap Heuristik yang ditempuh peneliti ini, kegiatan diarahkan pada pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan sesuai judul, Sumber- sumber yang dimaksud berupa buku, arsip dan dokumen yang relevan dengan judul penelitian, dalam penelitian ini peneliti mencari, mengumpulkan data-data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian dengan cara mencari bukubuku maupun dokumen baik bentuk tercetak maupun non-cetak (e-book).

Pada tahap ini peneliti akan melakukan pencarian dan pengumpulan sumber yang relevan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini yaitu ketimpangan kekuatan partai politik pada masa orde baru. Berikut beberapa sumber dalam penelitian ini:

1. Arsip-arsip dan artikel mengenai Pemilihan Partai Politik Pada Masa Orde Baru yang terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
2. Buku Maf'ul, Arsyad mengenai partai politik pada masa orde baru dan orde lama.
3. Buku Suryadinata, Leo mengenai golkar dan militer.
4. Jurnal ilmu pemerintahan Sulaeman, A mengenai demokrasi, partai politik, dan pemilihan kepala daerah.

### **3.1.3 Kritik**

kritik sumber merupakan tahapan dalam melihat kelayakan dari sumber yang diperoleh dapat mendukung penelitian atau tidak. Proses ini dilakukan penulis dengan cara memilah-milah dan menyesuaikan data yang diperoleh dari heuristik dengan tema yang akan dikaji serta keaslian data sudah dapat diketahui (Ali, M, 2005: 23). sumber yang diperoleh dalam tahap heuristik, Dalam tahap ini, sumber yang telah dikumpulkan pada kegiatan heuristik yang berupa: buku, arsip dan dokumen yang sesuai dengan judul penelitian, maka selanjutnya dilakukan penyeleksian dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni sumber yang factual dan orisinalnya terjamin. Kritik terdiri dari kritik internal dan kritik eksternal. Kritik intern adalah suatu upaya yang dilakukan oleh sejarawan untuk melihat apakah isi sumber tersebut cukup kredibel atau tidak. Pada tahap ini peneliti akan melakukan kritik pada sumber yang telah dikumpulkan, kritik ini dilakukan baik dari segi fisik dan sumber. Kritik ekstern adalah kegiatan sejarawan untuk melihat apakah sumber yang didapatkan autentik ataukah tidak. Pada tahap kritik eksternal yang dipersoalkan bahan dan bentuk sumber, umur dan asal dokumen (Zulaicha, Lilik, 2014:17).

### **3.1.4 Interpretasi**

Interpretasi atau Penafsiran, adalah suatu upaya sejarawan untuk melihat kembali tentang sumber-sumber yang didapatkan dari penafsiran sejarawan terhadap sumber-sumber sejarah dalam bentuk tertulis. Dalam penulisan sejarah ketiga tahapan diatas yang dimulai dari heuristik, kritik dan analisis belum tentu menjamin keberhasilan dalam penulisan sejarah. Oleh karena itu harus dibarengi oleh latihan-latihan yang intensif (Zulaicha, Lilik, 2014: 18).

Pada tahapan ini menuntut kehati-hatian dan integritas peneliti untuk menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah pada sumber yang telah melalui tahapan heuristik dan kritik diatas pada data-data yang berhubungan dengan penelitian peneliti yaitu Ketimpangan kekuatan partai politik pada masa orde baru.

### **3.1.5 Historiografi**

Historiografi merupakan rekonstruksi masa lalu. Dalam penulisan ini langkah yang ditempuh penulis pertama kali adalah pemilihan topik, langkah kedua studi pustaka dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan majalah. Langkah ketiga melalui kritik sumber penulis mulai mengecek keaslian sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Langkah selanjutnya dengan menafsirkan fakta sejarah yang diperoleh secara bulat dan menyeluruh. Langkah terakhir penulis mulai menuliskan dan menyusun fakta-fakta kedalam karya sejarah (Kuntowijoyo, 1995: 36).

## **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menguji hipotesis yang telah diajukan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

### **3.2.1 Teknik Kepustakaan**

Menurut Mardalis dalam Sari (2020: 43), Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku sejarah, dsb. Menurut Sugiyono (2012:291), Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah. Berdasarkan pengertian teknik kepustakaan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber berupa literature ilmiah, dokumen, buku, majalah yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu kekuatan partai politik pada masa orde baru.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode kepustakaan untuk memperoleh data tentang sejarah partai politik pada masa orde baru, jumlah perolehan suara pada masa orde baru. Awal mulanya, peneliti akan membuat surat izin penelitian kepada Pihak FKIP Unila, setelah mendapatkan surat izin penelitian, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan cara berkunjung ke tempat-tempat yang mampu memberikan sumber data yang valid untuk menunjang topik penelitian.

### **3.2.2 Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil-dalil atau buku-buku lain yang berkenaan dengan masalah-masalah penyelidikan (Nawawi, 1991: 133). Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan tulisan dengan bukti-bukti yang nyata dari sumber yang diperoleh (Sari, dkk, 2013:3). Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2015:329). Berdasarkan pengertian teknik dokumentasi tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen berupa arsip ataupun tulisan yang diperoleh yang berkaitan dengan dengan topik penelitian yaitu kekuatan partai politik pada masa orde baru.

Awal mulanya, peneliti akan membuat surat izin penelitian kepada Pihak FKIP Unila, setelah mendapatkan surat izin penelitian, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan cara berkunjung ke tempat-tempat yang mampu memberikan sumber data yang valid untuk menunjang topik penelitian seperti Perpustakaan Nasional, komisi pemilihan umum (KPU).

### **3.3 Teknik Analisis Data**

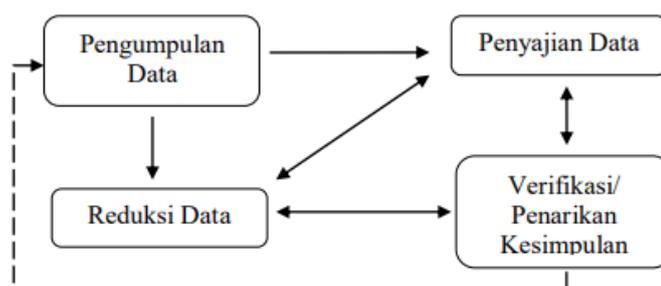
Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2012: 244).

1. *Data Display* (penyajian data) Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data.

Data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya.

2. *Conclusion drawing/ verification* (pengambilan kesimpulan) Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan.



Teknik Analisis Data (Rijali, 2018:83).

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian dan Analisis data yang ditulis dalam bab-bab diatas maka peneliti memperoleh hasil data dan dapat menyimpulkan:

Penyebab terjadinya ketimpangan kekuatan partai politik pada masa orde baru:

#### **1. Dukungan Rezim**

(1) ABRI dengan dwi fungsi nya dilandaskan oleh UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. bertujuan menjadikan ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan.

Pasal 28 ayat (1) menegaskan, Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggungjawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan.

(2) Undang- Undang No.3 Tahun 1975 Tentang partai politik dan Golongan Karya. pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia yaitu dikeluarkan nya kebijakan fusi partai politik menjadi tiga yaitu PPP, PDI, dan Golongan Karya.

(3) Pemerintah menerbitkan Kepres No 82 Tahun 1971 Tentang Pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai wadah satu-satunya bagi pegawai negeri. Korpri pun lalu dimasukan sebagai bagian dari Golkar.

## **2. Strategi Partai**

Pada setiap pemilihan umum, Golkar sangat menonjol dalam kampanye dibanding partai-partai lainnya. Golkar memiliki cara tersendiri dalam melakukan kampanye seperti: Golkar undang pers asing beserta para artis papan atas dan mendominasi keberadaannya melalui panggung-panggung musik sehingga menarik massa dalam berkampanye, Golkar menarik massa melalui Pelopor Pembangunan.

## **3. Dukungan Organisasi Massa**

GUPPI memiliki peranan yang strategis dalam upaya menarik masa islam sebanyak mungkin. GUPPI sangat berperan dalam kemenangan yang diperoleh Golongan Karya dalam pemilihan umum. Pada kampanye nya GUPPI melakukan kampanye ke pondok-pondok pesantren dan melakukan pendekatan dengan ulama- ulama yang berpengaruh.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca dapat mengerti mengenai apa yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kekuatan partai politik pada masa orde baru, serta menambah wawasan tentang Sejarah politik pada masa orde baru.

2. Bagi Para Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk penelitian mengenai politik masa orde baru.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdurrahman, D. (2007). *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Terapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, M. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Lkis.
- Budiardjo, Miriam. (1989). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Friyanti, Friska. (2005). *Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia* Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Gani, Soelistyati Ismail. (1984). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husin Sayuti. (1989). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Jakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Manam, M'Azzam dan Thung Ju Lan. (2011). "Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia sebagai Sebuah Problem Kontemporer". Dalam Thum Ju Land an M'Azzam Manam, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya*. Jakarta: LIPI.
- Maf'ul, Arsyad. (2012). *Partai Politik Pada Masa Orde Baru dan Orde Lama*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Nawawi, H. (2001). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pambudi, A. (2009). *Supersemar Palsu Edisi Revisi III*. Tangerang: PT.Agro Pustaka.

- Radi, U. (1984). *Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Semasa 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*. Malang: Integrita Press.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryadinata, Leo. (1992). *Golkar Dan Militer (Studi Tentang Budaya Politik)*. Jakarta: Lp3es.
- Tandjung, Akbar. (2007) *The Golkar Way: Survival Partai Golkar Di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Tirtosudarmo, Riwanto. (2011). "Nasionalisme dan Ketahanan Budaya : Beberapa Catatan dari Perspektif Demografis" dalam Thum Ju Land an M'Azzam Manam, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya*. Jakarta: LIPI.
- Univeristas Gadjah Mada. (2017). *Bagaimana Kondisi Sosial Politik di Indonesia?*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Gadjah Mada.
- Zulaicha, Lilik. (2014). *Metologi Sejarah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

## 2. Jurnal

- Arawan, Feri. (2018). Konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tahun 2014-2016. *Jurnal Fisip*. 5 (1) 2.
- Ariffin, Munawir. (2019). Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan Di Masa Orde Baru. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan*. 1 (5) 14.
- Goncing, Nurlira. (2015). Politik Nahdhatul Ulama Dan Orde Baru. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*. 1 (1) 66.
- Hadi, Kusuma. (2012). Propaganda Orde Baru 1960-1980. *Jurnal Propaganda, Politics, New Order*. 1 (1) 40-41.
- Iffatun, Noviah Nisa, Mohammad Na'imb dan Nurul Umamah. (2017). Strategy Of Golongan Karya To Be winner In Election Year 1971-1997. *Jurnal Historica*. 1 (1) 145.
- Moch. Eshza. (2014). Aktivitas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Kota Surabaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 1977-1987. *Jurnal Kesejarahan*. 2 (4) 135.

Rodriquest, Alphonsius Eko.W, Kurniawati, M.Hasmi Yanuardi, Maulani. (2020). Dwifungsi ABRI Dalam Konflik Internal PDI 1976-1998. *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 9 (2) 188.

Rohmawai, Yuli. (2016). Perubahan Elektabilitas Partai Peserta Pemilu Di Yogyakarta Tahun 1971-1999. *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 4 (2) 314.

Sulaeman, A. (2015). Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1 (1) 18-19.

### **3. Sumber Internet Atau Lain-Lain**

Gama Prabowo. 1 November 2020. Sistem Kepartaian Masa Orde Baru. Kompas.com. (diakses pada 16 Januari 2022).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *SISTEM MULTI PARTAI, PRESIDENSIAL DAN PERSOALAN EFEKTIVITAS PEMERINTAH*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undang.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/438-sistem-multi-partai-presidensial-dan-persoalan-efektivitas-pemerintah.html>. (diakses pada 07 April 2021).